



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
FORUM PENGEMBANGAN KAMPUNG BATIK
LAWEYAN (FPBKL) DALAM MENGUATKAN
INDUSTRI BATIK SEBAGAI RESPON TERHADAP
SERBUAN TEKSTIL MOTIF BATIK TIONGKOK (2010-
2015)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Vina Septian Pradisa

2013330011

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**UPAYA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
FORUM PENGEMBANGAN KAMPUNG BATIK
LAWEYAN (FPBKL) DALAM MENGUATKAN
INDUSTRI BATIK SEBAGAI RESPON TERHADAP
SERBUAN TEKSTIL MOTIF BATIK TIONGKOK (2010-
2015)**

Skripsi

Oleh

Vina Septian Pradisa

2013330011

Pembimbing,

Dr. Phil. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Vina Septian Pradisa
Nomor Pokok : 2013330011
Judul : Upaya Pemerintah Kota Surakarta dan Forum Pengembangan
Kampung Batik Laweyan (FPKBL) dalam Menguatkan
Industri Batik Sebagai Respon Terhadap Tekstil Motif Batik
Tiongkok (2010-2015)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 13 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Giandi Kartasmita, S.Ip.,M.A. : _____

Sekretaris

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.Ip.,M.A. : _____

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.Ip.,M.A : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xii
DAFTAR AKRONIM.....	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 SURVEY LITERATUR.....	9
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN.....	17
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	25
1.6.1 Metode Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	26

BAB II

BATIK SEBAGAI SALAH SATU KLAS TER INDUSTRI DI KOTA SURAKARTA.....	27
2.1 PROFIL KOTA SURAKARTA.....	27
2.1.1 Deskripsi Umum Kota Surakarta.....	28
2.1.2 Perekonomian Kota Surakarta.....	34
2.1.3 Industri, Perdagangan dan Nilai Ekspor Kota Surakarta.....	39
2.2 BATIK DI KOTA SURAKARTA.....	42
2.2.1 Jenis Batik di Kota Surakarta.....	42
2.2.2 Pola Dasar dan Motif Batik di Kota Surakarta.....	43
2.2.3 Kondisi Industri Batik di Kota Surakarta.....	47
2.3.PROFIL KLAS TER INDUSTRI BATIK YANG ADA DI KOTA SURAKARTA.....	50
2.3.1 Sejarah Kampung Batik Laweyan.....	50
2.3.2 Profil Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan sebagai Klaster Industri Batik di Kota Surakarta.....	53
2.3.3 Sejarah Kampung Batik Kauman.....	57
2.3.4 Profil Paguyuban Kampung Batik Kaoeman sebagai Klaster Industri Batik di Kota Surakarta.....	60

BAB III

UPAYA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN FORUM PENGEMBANGAN KAMPUNG BATIK LAW EYAN DALAM MENGUATKAN INDUSTRI BATIK SEBAGAI RESPON TERHADAP SERBUAN PRODUK TEKSTIL MOTIF BATIK DARI TIONGKOK.....	63
3.1 GAMBARAN UMUM BATIK INDONESIA DAN BATIK PRINTING DARI TIONGKOK.....	64
3.1.1 Batik Indonesia sebagai Warisan Budaya dari Indonesia.....	64

3.1.2 Pengaruh Budaya Tiongkok dalam Motif Batik Indonesia.....	66
3.1.3 Sejarah Batik Printing di Tiongkok.....	68
3.2 INDUSTRI BATIK DI KOTA SURAKARTA SETELAH KEBERADAAN ACFTA.....	70
3.2.1 Tekstil Motif Batik dari Tiongkok Mendominasi Pasar Batik Indonesia.....	70
3.2.2 Dampak Serbuan Tekstil Motif Batik dari Tiongkok terhadap Keberadaan Industri Batik di Kota Surakarta.....	73
3.2.3 Potensi Keberadaan Industri Batik Kota Surakarta.....	78
3.3 DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN INDUSTRI BATIK KOTA SURAKARTA.....	80
3.3.1 Peraturan Menteri Peindustrian RI Nomor 78/M- IND/Per9/2007.....	80
3.3.2 Keputusan Menteri Perindustrian No 521/M- IND/Kep/12/2015.....	83
3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN INDUSTRI BATIK.....	83
3.4.1 Aspek pembinaan Pemerintah Kota Surakarta terhadap Industri Batik di Kota Surakarta.....	84
3.4.2 Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas UKM dan Koperasi dalam Penguatan Industri Batik di Kota Surakarta.....	86
3.5 UPAYA FPKBL SEBAGAI SALAH SATU KELEMBAGAAN KLASTER INDUSTRI BATIK DALAM PENGUATAN INDUSTRI BATIK DI KOTA SURAKARTA.....	95
3.5.1 FPKBL Sebagai Aspek Kelembagaan Industri Batik Kota Surakarta.....	96
3.5.2 Program FPKBL dalam Menguatkan Industri Batik.....	97
3.6 Epilog.....	102

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN.....105

LAMPIRAN.....110

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1 logo Kota Surakarta

Gambar 2.2 Grafik Struktur Ekonomi dalam 9 Sektor Kota Surakarta Tahun 2014.

Gambar 2.3 Grafik Struktur Ekonomi dalam 3 Sektor Kota Surakarta Tahun 2014

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional 2011-2015

Gambar 2.5 Grafik Jumlah Industri Kota Surakarta 2011-2015

Gambar 2.6 Grafik Unit Usaha Kecil, Menengah, Besar Kota Surakarta 2011-2015

Tabel 2.2 Tabel Inflasi Kota Surakarta

Tabel 2.3 Tabel Jumlah Industri di Kota Surakarta

Tabel 3.1 Tabel pelatihan Disperindag tahun 2011

Tabel 3.2 Tabel pelatihan Disperindag tahun 2012

Tabel 3.3 Tabel Pekatihan Disperindag tahun 2013

Tabel 3.4 Tabel Pelatihan Disperindag tahun 2014

Tabel 3.5 Tabel Pelatihan Disperindag tahun 2015

Tabel 3.6 Tabel Pelatihan Kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2011

Tabel 3.7 Tabel Pelatihan Kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2012

Tabel 3.8 Tabel Pelatihan Kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2013

Tabel 3.9 Tabel Pelatihan Kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2014

Tabel 3.10 Tabel Pelatihan Kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2015

DAFTAR AKRONIM

ASEAN	: Association of South East Asia Nations
ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Area
FPKBL	: Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan
SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
UNESCO	: United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization
UKM	: Usaha Kecil Menengah
IKM	: Industri Kecil Menengah
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
MNC	: Multi National Corporation

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kerjasama antar negara merupakan salah satu isu yang cukup menarik dalam kajian hubungan internasional. salah satu bentuk nyata dari isu kerjasama tersebut adalah keberadaan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) sebagai wujud kerjasama antar negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam rangka memperkuat hubungan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Dalam kerangka kerjasama tersebut, negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut termasuk di dalamnya adalah Indonesia akan saling memberikan *preferential treatment* di tiga sektor yaitu sektor barang, jasa, dan investasi dengan tujuan memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara anggota sehingga akhirnya membentuk suatu kawasan perdagangan bebas. *Preferential treatment* sendiri berarti pemberian perlakuan khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada negara mitra dagang lain non-anggota pada umumnya.¹

Pembentukan ACFTA dimulai dengan adanya penandatanganan *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam oleh para

¹ “ASEAN-China Free Trade Area” Di akses dari
<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>

Kepala Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok. Selanjutnya titik awal proses pembentukan ACFTA, para Kepala Negara dari negara-negara di ASEAN dan Tiongkok menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.²

Tujuan dari ACFTA sendiri adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang

²Ibid

transparan dan untuk mempermudah investasi. Selain itu, tujuan dari ACFTA juga menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dari negara ASEAN yang baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.³

Tantangan dari keberadaan ACFTA sendiri yakni Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Tiongkok, Indonesia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing, selain itu juga menerapkan ketentuan dan peraturan investasi yang transparan, efisien, dan ramah dengan dunia usaha, serta Indonesia juga di harapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby bagi setiap produknya.⁴

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.2.1 Deskripsi Masalah

ACFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN termasuk juga di dalamnya Indonesia yang bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan.

³ Ibid

⁴ Ibid

Dalam implementasi nya, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk menurunkan nilai hambatan perdagangan hingga ke angka 0%. Dengan hal ini, produk Tiongkok akan membanjiri Indonesia dengan sangat murah. Salah satu produk dari Tiongkok yang membanjiri pasar di Indonesia adalah produk tekstil.

Jenis produk tekstil dari Tiongkok yang cukup mendominasi pasar Indonesia adalah jenis tekstil motif batik atau biasa di kenal dengan sebutan batik printing. Produk tekstil motif batik dari Tiongkok masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah jauh dari harga pasaran batik lokal. Dengan penawaran yang terbilang cukup menarik ini akhirnya masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah akan cenderung lebih memilih tekstil motif batik milik Tiongkok ketimbang membeli produk batik asli.

Di samping harga yang murah preferensi masyarakat terhadap produk tekstil motif batik dari Tiongkok juga di sebabkan karena masyarakat Indonesia masih sangat minim informasi mengenai cara membedakan batik asli dan tekstil motif batik. Perlu di ketahui bahwa tekstil motif batik atau batik printing sebenarnya tidak dapat di kategorikan sebagai batik. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNESCO, batik merupakan produk asli Indonesia, di buat dengan keterampilan tertentu menggunakan canting dan berbahan baku

Gondorukem.⁵ Sehingga dengan ketentuan tersebut, seharusnya tekstil motif batik produksi Tiongkok sendiri tidak bisa di kategorikan sebagai batik karena menggunakan mesin cetak dan tanpa keterampilan tangan manusia.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batik asli dan tekstil motif batik ini juga di pengaruhi faktor karena belum semua industri batik memiliki batik mark sebagai lisensi bagi setiap industri batik yang menyatakan bahwa produk batik mereka adalah batik asli Indonesia. Nantinya, di harapkan seluruh industri batik yang ada di Indonesia dapat memiliki lisensi ini untuk memperkuat strategi pemasaran dan kepercayaan masyarakat atas usaha batik mereka.

Untuk mendapatkan lisensi batik mark ini harus membayar dengan harga yang cukup mahal sehingga tidak semua industri batik mampu mendapatkannya. Sehingga karena belum keseluruhan industri batik memiliki batik mark, maka pada akhirnya hal ini menjadikan masyarakat umum tidak terlalu mempersoalkan batik yang mereka beli dan pakai adalah batik asli warisan budaya Indonesia atau hanya tekstil dengan motif batik dari Tiongkok⁶

⁵ Priyambodo R.H, “Mutu Batik China di bawah Indonesia”, di akses dari <http://www.antaranews.com/berita/336422/mutu-batik-china-di-bawah-indonesia> pada 29 Maret 2016 pukul 22.30 WIB

⁶ “Membangun Reputasi Lewat Batik Mark” di akses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6122/Membangun-Reputasi-Batik-Lewat-Batik-Mark> pada 15 November 2016 pukul 22.45 WIB

Preferensi masyarakat yang cukup terhadap produk tekstil motif batik milik Tiongkok secara tidak langsung berimbas pada kenaikan impor dari produk ini. Berdasarkan badan pusat statistik, tercatat sebanyak 1.037 ton produk batik printing dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Impor terbesar adalah untuk jenis kain tenun yang di cetak batik yaitu sebanyak 677,4 ton dengan nilai 23,3 juta dolar AS dan kain tenun yang dicetak dengan proses batik sebanyak 199,2 ton atau bernilai 1,8 juta dolar AS pada tahun 2012. Masuknya impor terbesar produk batik dari Tiongkok ini terjadi pada bulan juli 2012 yaitu sebanyak 106,7 ton dengan nilai 3,6 juta dolar AS dan pada bulan desember 2012 sebanyak 87,4 ton dengan nilai 3 juta dolar AS.

Impor atas batik printing dari Tiongkok yang melonjak drastis inilah yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi keberadaan industri batik di Indonesia khususnya bagi pengrajin batik tulis maupun batik cap yang ada di daerah industri batik seperti Pekalongan, Yogyakarta, Cirebon, Surakarta dan daerah-daerah lain yang menjadikan batik sebagai salah satu klaster industri daerah.⁷

Para pelaku industri batik yang ada di Indonesia mengaku cukup merasa terganggu dengan meningkatnya impor tekstil motif batik sebagai bukti bahwa tekstil motif batik menggeser pasar batik lokal di Indonesia karena menyebabkan produk batik yang mereka jual menjadi

⁷ “2012, Indonesia Impor Batik Senilai Rp 285 Miliar” di akses dari <http://www.kemiperin.go.id/artikel/5715/2012> di akses pada 13 November 2016 pukul 23.00 WIB

sepi pembeli. Para pelaku industri batik di Indonesia juga mengharapkan adanya suatu bentuk kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga produk batik mereka dapat tetap bersaing dengan tekstil motif batik dari Tiongkok yang membanjiri pasar batik di Indonesia.⁸

Beranjak dari permasalahan tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengupayakan penguatan bagi industri batik tanah air agar setiap produk batik Indonesia tidak kalah dengan produk tekstil motif batik dari Tiongkok.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pemilihan tempat untuk penelitian ini juga di fokuskan di Kota Surakarta, Indonesia karena salah satu industri penghasil batik terbesar di Indonesia berada di kota Surakarta. Industri batik sendiri juga merupakan salah satu klaster industri utama yang cukup berpengaruh di Kota Surakarta terbukti dengan adanya kampung batik Laweyan dan kampung batik Kauman sebagai klaster industri penghasil batik di Kota Surakarta. Namun pada penelitian ini, penulis hanya akan membatasi penelitian di salah satu klaster industri batik yaitu kampung Batik Laweyan, Surakarta.

Aktor yang di pilih pada penelitian ini terbatas pada pemerintah Kota Surakarta dan industri batik di Kota Surakarta. Hal ini karena pemerintah Kota Surakarta memiliki andil dalam kebijakan publik terkait

⁸ “Batik Printing Meresahkan” di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5125bdf7f1b44/batik-printing-meresahkan> pada 13 November 2016 pukul 22.45 WIB

dampak dari serbuan batik printing dari Tiongkok itu sendiri bagi perekonomian di Kota Solo. Sementara itu, para pelaku industri Batik sendiri di harapkan merupakan aktor yang merasakan dampak secara langsung dari keberadaan serbuan tekstil motif batik dari Tiongkok di Indonesia khususnya Kota Surakarta.

Penelitian ini juga terbatas hanya pada isu mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh aktor terkait industri batik di Kota Surakarta khususnya Laweyan yaitu Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi serangan batik Printing dari Tiongkok yang membanjiri pasaran batik di Indonesia khususnya Kota Solo.

Tahun yang di pilih pada penelitian ini adalah dari tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010 terbukti adanya penguatan pasar batik Indonesia hingga ke pangsa pasar luar negeri. Namun pada akhirnya hal ini terus menurun hingga tahun 2012 yang merupakan tahun puncak impor tekstil motif batik Tiongkok tertinggi yang kemudian menyebabkan industri batik di Indonesia kian tergerus.⁹ Pada Tahun 2015 sendiri merupakan tahun dimana Masyarakat Ekonomi ASEAN dimulai sehingga hal ini akan tentu akan berpengaruh terhadap nilai impor dari negara lain.

⁹ "Batik Tulis Kian Tergerus" di akses dari <http://www.viva.co.id/haji/read/638420-batik-tulis-yogya-kian-tergusur-produk-asing> pada 15 Januari 2017 pukul 01.40 WIB

1.2.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan bermula dari sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kota Solo dan Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL) dalam menguatkan industri batik sebagai respon terhadap serbuan tekstil motif batik dari Tiongkok (2010-2015)

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan upaya Pemerintah Kota Surakarta dan FPKBL dalam menguatkan industri batik sebagai respon terhadap serbuan tekstil motif batik dari Tiongkok (2010-2015).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan nantinya bisa berguna untuk menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang membahas mengenai keberadaan klaster industri khususnya industri Batik serta bentuk strategi dan kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan produk dari luar negeri.

1.4 SURVEY LITERATUR

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil beberapa kajian literatur yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Literatur yang pertama adalah jurnal Fokus Ekonomi Vol. 7, No. 3, 2008

dengan judul “Analisis Industri Batik Indonesia” yang disusun oleh Nurainun, Heriyana dan Rasyimah dari Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Aceh.

Industri batik di Indonesia umumnya merupakan industri kecil menengah (IKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Sebelum krisis moneter pada tahun 1997 industri kecil menengah ini sempat mengalami kemajuan yang pesat. Beberapa pengusaha batik sempat mengalami masa kejayaan. Apalagi pada tahun 1980-an batik merupakan pakaian resmi yang harus dipakai pada setiap acara kenegaraan ataupun acara resmi lainnya. Sehingga dapat mengenalkan dan meningkatkan citra batik di dunia internasional pada waktu itu. Industri batik di Indonesia tersebar di beberapa daerah di pulau Jawa yang kemudian menjadi nama dari jenis-jenis batik tersebut seperti batik Pekalongan, batik Surakarta, batik Yogya, batik Lasem, batik Cirebon, batik Sragen. Setiap batik dari daerah tersebut memiliki ciri motif yang spesifik.

Industri batik di Jawa mengalami pasang surut. Sempat maju dan berkembang pesat pada tahun 1970an. Dan mengalami kemunduran disebabkan oleh krisis moneter tahun 1997, bom Bali 1 dan 2 yang memperparah keadaan dan juga bencana alam yang terus saja terjadi sampai saat ini (gempa di Yogya dan lumpur Sidoarjo). Akibatnya ekspor batik Indonesia yang diperkirakan mencapai US\$ 100 juta/tahun menjadi berkurang. Selain hal tersebut, Ini juga disebabkan oleh pembeli asing

yang cenderung mencari batik printing dengan harga yang lebih murah. Apalagi saat ini negara kompetitor yaitu Vietnam dan Tiongkok sudah mengembangkan mesin batik printing yang lebih canggih. Sehingga dengan hal tersebut ekspor berkurang sebanyak 40 %.

Hal lain yang menjadi masalah bagi industri batik adalah kurangnya bahan baku, sehingga kebanyakan pengusaha batik mengimpor sehingga biaya produksi semakin meningkat dan harga jual semakin mahal. Sementara itu pasar domestik juga bersaing dengan batik printing dari Tiongkok yang lebih murah. Masalah lain yang dihadapi oleh industri batik Indonesia adalah hak paten.

Fokus Ekonomi desain dan corak batik Indonesia ditiru oleh Tiongkok, Malaysia dan Vietnam. Apalagi saat ini Malaysia telah mempatenkan batik sebagai produk Malaysia dan mempunyai hak untuk ekspor. Ini sangat merugikan industri batik di Indonesia. Sehingga masalah hak cipta ini membuat para pengrajin batik dirugikan. Dan lagi selama ini batik telah dikenal sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan ini menjadi polemik jika para pengrajin tidak diarahkan untuk mempatenkan desain yang mereka buat untuk menghindari penjiplakan. Untunglah saat ini batik sudah diakui oleh lembaga PBB yaitu UNESCO sebagai bagian warisan budaya dari Indonesia.¹⁰

Literatur yang kedua adalah Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 halaman 199 – 213 dengan judul

¹⁰ (Nurainun, Heriyana, dan Rasyimah, Desember, 2008) di akses dari <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/1647> pada 18 Oktober 2016 pukul 22.30 WIB

Kendala dan Upaya Pengembangan Industri Batik di Surakarta menuju Standarisasi yang disusun oleh Ahmad Sani Alhusain dari P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan produk batiknya. Bahkan Surakarta lebih dikenal dengan sebutan kota batik. Faktanya sebagian besar batik yang dihasilkan di Surakarta merupakan hasil dari industri kecil dan menengah yang dikelola secara tradisional. Sebagian besar dari sumber daya manusia yang memproduksi batik memiliki kemampuan membatik secara turun temurun. Dapat dikatakan bahwa membatik telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Surakarta.

Berdasarkan hal tersebut, dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas produk batik yang dihasilkan sangat diperlukan. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini cukup derasnya produk tekstil batik negara lain masuk ke Indonesia. Ini merupakan tantangan bagi Kota Batik Surakarta untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

Kementerian Perindustrian dalam tahun 2012 menyatakan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat dalam tahun 2012, Indonesia mengimpor kain dan produk jadi batik dari Tiongkok sebanyak 1.037 ton bernilai US\$30 juta atau sekitar Rp285 miliar. Sebagian besar adalah batik printing (cetakan mesin).

BPS pada tahun 2013 mencatat Indonesia mengimpor sebanyak 282,3 ton produk batik dari berbagai negara dengan nilai mencapai USD5,2 miliar pada tahun 2013. Impor terbesar berasal Tiongkok sebesar 136,8 ton, senilai USD2,1 juta. Setelah itu disusul oleh Italia yang mengirim produk batiknya ke Tanah Air sebesar 43,1 ton, senilai USD937,6 ribu. Negara lain yang mengekspor produk batiknya ke Indonesia adalah Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang.

Kondisi ini memaksa industri batik Indonesia untuk dapat bersaing dengan produk batik impor. Gencarnya komoditas produk-produk impor khususnya produk batik yang menyerbu Indonesia dari Tiongkok, Italia, Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang ini merupakan implikasi dari berlakunya perdagangan bebas di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Tiongkok.

Kelemahan pengelolaan produk lokal di tanah air adalah akibat daya saing yang sangat lemah serta tidak mampu berkompetisi produknya dengan produk impor. Untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar tidak semakin merosot, Indonesia harus mengantisipasi kelemahan kompetensi industri tanah air agar dapat lebih ditingkatkan baik kompetensi industri maupun kompetensi sumber daya manusianya. Beberapa kelemahan kompetensi yang mengemuka seperti banyaknya perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi yang menyentuh pada perusahaan tradisional sebagai kekuatan lokal belum sepenuhnya dapat diikuti dengan

kemampuan dan keterampilan tenaga kerjanya. Di masa depan, hanya industri yang memiliki daya saing yang tinggi yang akan mampu bertahan dan berkembang menghadapi persaingan global.¹¹

Literatur ketiga yang digunakan penulis adalah Jurnal Informasi No. 1 Tahun 2013 yang berjudul Akulturasi Batik Tradisional Jawa dengan Cina yang di tulis oleh Dina Dwikurniarini, Agus Murdyastomo, dan Ririn. Pada jurnal ini di jelaskan bahwa batik Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga tetap mampu bersaing di pasar global.

Dari perkembangan perdagangan batik di Indonesia saat ini juga muncul produk batik dari Tiongkok . Banyak orang tidak menyadarinya sehingga menganggap sebagai produk dalam negeri dengan kreasi baru saja. Apakah keadaan itu dapat mempengaruhi eksistensi batik itu sendiri atau semakin menenggelamkan batik tradisis Indonesia asli dimasa mendatang. Disini peran dari seniman batik menjadi penting karena dari kreasi merekalah yang akan memepertahankan keaslian batik tradisional Indonesia. Meskipun dunia sudah mengakui bahwa batik adalah asli budaya Indonesia , keaslian itu harus tetap dipertahankan.

Tiongkok tidak hanya mempengaruhi batik dalam ragam hias tetapi juga dalam perdagangan bahan batik. Di Yogyakarta tahun 1930

¹¹ (Alhusain, Desember 2015) di akses dari <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/348> pada 18 Oktober 2016 pukul 22.45 WIB

sudah ada perusahaan batik milik pribumi dan orang Cina yang mengusahakan batik halus maupun perusahaan batik cap.

Masuknya pengusaha Tiongkok dalam produksi batik abad ke-19 membawa banyak perubahan. Orang-orang Tiongkok adalah para pembuka jalan dalam perdagangan batik. Penggunaan cap untuk produksi batik menyebabkan semakin luasnya perdagangan batik, tetapi batik tradisional yang dikerjakan dengan tangan tetap menjadi kerajinan yang digemari oleh golongan mampu.

Saat ini batik dari Tiongkok telah menyerbu pasar Indonesia dengan harga yang luar biasa murah. Hal ini tentu merupakan tantangan berat bagi pengusaha batik Indonesia. Konsumen tentu akan lebih memilih barang dengan harga yang lebih murah. Produk batik Tiongkok dapat dijual dengan harga yang relatif murah karena dalam pengerjaannya Tiongkok menggunakan teknik printing untuk batik yang mereka produksi. Dengan dicetak langsung pada kain maka batik dapat diproduksi secara massal dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya penghematan waktu dan tenaga tentu mampu mengurangi biaya produksi. Perbandingan harga bisa mencapai hampir 50%.¹²

Sebaliknya batik produk Indonesia cenderung lebih mahal karena beberapa hal. Pertama produksi batik menggunakan teknik canthing dan

¹²(Dina Dwi Kurniarini, 2013) di akses dari dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4440> pada 22 November 2016 pukul 22.45 WIB

cap yang tentu saja memakan waktu dan tenaga. Produk *hand made* tentu lebih bernilai dibandingkan dengan produk massal. Kedua, hampir 80% bahan baku pembuatan batik di Indonesia harus diimpor dari Tiongkok , misalnya benang, sutera, dan cat. Dengan masuknya batik buatan Tiongkok yang memiliki harga jual lebih murah tentu menjadi ancaman bagi para perajin batik Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengembangan batik adalah adanya krisis regenerasi. Sebagai contoh kaum muda di kampung batik Trusmi di Cirebon dan Indramayu Jawa Barat yang cenderung enggan melanjutkan usaha batik tulis yang dirintis pendahulu mereka. Seorang pengusaha batik bahkan harus mempekerjakan pembatik dari luar daerah misalnya dari Pekalongan Jawa Tengah untuk membatik di tempatnya. Regenerasi batik belum berjalan baik. Pembelajaran otodidak yang diwariskan turun temurun dari orang tua dan anaknya kurang efektif.

Pembatik yang aktif bekerja di Trusmi umumnya berusia di atas 40 tahun. Tenaga muda diperlukan agar batik Cirebonan bisa kreatif dan inovatif dalam menghadapi gempuran dari Tiongkok . Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan ketrampilan membatik dalam pendidikan formal. Beberapa sekolah sudah menjadikan kegiatan membatik sebagai kegiatan pilihan dalam program ekstra-kurikuler.

Pemerintah perlu mendirikan sekolah ketrampilan khusus yang mendidik generasi muda menjadi perajin-perajin batik yang mahir.¹³

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan salah satu teori besar dalam Ilmu Hubungan Internasional yaitu Liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu teori besar yang digunakan dalam ilmu hubungan Internasional. Liberalisme meyakini bahwa pada dasarnya negara seperti manusia yang adalah makhluk rasional sehingga mengutamakan kebebasan individu diatas segalanya sehingga individu ini dapat melakukan kerjasama dengan membentuk organisasi internasional bagi keuntungan seluruh pihak.¹⁴

Dalam perspektif Liberalisme, Liberalisme dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi liberalisme institusional, dan liberalisme republikan. Teori interdependensi merupakan istilah yang pertamakali dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam sebuah buku berjudul *Power and Interdependence* tahun 1977. Konsep mengenai Interdependensi ini lahir seiring dengan munculnya era globalisasi, yang pada dasarnya menyadarkan Negara-negara bahwa militer bukan lagi menjadi solusi tunggal dan dominan untuk mencapai tujuan atau kepentingan Negara, seperti; peningkatan perekonomian, penyelesaian konflik, maupun

¹³ Ibid

¹⁴Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction International Relations Theories & Approaches*, Oxford, 2010, hal 96 - 98.

masalah sosial. Akan tetapi, berdasarkan kepada teori Interdependensi Kompleks Keohane dan Nye, “saling mengembangkan kerjasama internasional” dan “berketergantungan” lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan Negara tersebut.¹⁵

Namun pada kenyataannya, keberadaan kerjasama internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional kedua belah pihak negara ternyata dapat tidak selamanya terwujud apabila suatu negara tidak memiliki mutual gain yang sama dengan negara lainnya. Salah satu dampak dari keberadaan kerjasama internasional ini memungkinkan adanya kerugian yang di alami satu pihak negara terkait dengan kepentingan nasional negara tersebut.

Dalam kerjasama internasional seperti yang di kemukakan dalam konsep interdependensi ternyata tidak hanya berlaku untuk aktor negara saja melainkan aktor non- negara seperti organisasi internasional, individu dan MNC. Pernyataan tersebut berangkat dari sebuah paradigma yaitu paradigma pluralisme. Dalam konteks ini, paradigma pluralisme juga menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak saja terbatas pada aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan

¹⁵ David Balaam dan Michael Veseth, “Introduction to International Political Economy”, (New Jersey-Hall,1996), hlm 241-257

hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralisme adalah Aktor non-negara memiliki peranan yang cukup penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs (Perusahaan Asing), kelompok ataupun individu; Negara bukanlah *unitary actor*/aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara sehingga negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara; Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.¹⁶

Beranjak dari paradigma pluralisme dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep globalisasi untuk menjelaskan mengenai masuknya tekstil motif batik dari Tiongkok ke Indonesia. Konsep Globalisasi dipahami sebagai salah satu konsep yang berhubungan erat dengan ilmu hubungan internasional. globalisasi sendiri identik dengan proses yang seolah-olah menghapuskan batasan geografis antar negara. Globalisasi juga sering di anggap sebagai liberalisasi yaitu proses

¹⁶ (M.Saeri, 2012) di akses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DUrEz9LziHWJ:ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/70/64+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada 17 Oktober 2016 pukul 22.30 WIB

penghapusan larangan-larangan pemerintah antar negara dalam rangka menciptakan perekonomian yang terbuka dan terintegrasi.

Globalisasi sendiri menunjukkan adanya perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya globalisasi adalah adanya opsi kebijakan terkait dengan liberalisasi dan regulasi keuangan dimana sebuah negara membuka diri terhadap aliran modal internasional atau melakukan kerjasama dengan negara lain.¹⁷

Dalam konsep globalisasi, salah satunya terdapat konsep globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi kegiatan ekonomi yang ada semakin mengglobal dan menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara.

Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan adanya proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, dan bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.

Derajat globalisasi dari suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara tersebut

¹⁷ “Fenomena Globalisasi Ekonomi” di akses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2498-06022008.pdf> pada 22 Oktober 2016 pukul 23.45 WIB

sebagai suatu persentase dari jumlah nilai atau volume perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara itu sebagai suatu persentase dari PDB-nya. Kedua, kontribusi dari negara tersebut dalam pertumbuhan investasi dunia, baik investasi langsung atau jangka panjang (penanaman modal asing; PMA) maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek. Sebagai suatu negara pengeksport (pengimpor) modal neto, semakin besar investasi dari negara itu (negara lain) di luar negeri (dalam negeri), semakin tinggi derajat globalisasinya. Derajat keterlibatan dari suatu negara (negara lain) dalam investasi di negara lain (dalam negeri) bisa diukur oleh sejumlah indikator.¹⁸

Beranjak konsep globalisasi, penulis juga menggunakan konsep kepentingan Nasional dalam menjelaskan dasar dari upaya penguatan industri batik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Konsep kepentingan nasional di sini untuk menjelaskan bahwa dalam kerjasama internasional seperti yang diungkapkan oleh interdependensi liberalisme, negara tetap harus menunjukkan perannya dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Hal ini sehingga kepentingan nasional negara tersebut tidak akan tergerus oleh dampak dari kerjasama internasional yang ada. Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.

¹⁸ “Globalisasi ekonomi dan Implikasinya terhadap Negara Berkembang” di akses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/drs-agus-sударsono/GLOBALISASI%20EKONOMI%20DAN%20IMPLIKASINYA%20TERHADAP%20NEGARA%20BERKEMBANG.pdf> pada 22 Oktober 2016 pukul 22.30 WIB

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia.

Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

“...hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional...”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah dan latar belakang yang dimiliki negara tersebut. Sehingga saat suatu negara ingin mengadakan kerjasama, negara dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan dari negaranya yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral dari semua nya itu pada dasarnya kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan

yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan”¹⁹

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa dalam kepentingan nasional sesungguhnya terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari suatu negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Dalam bukunya Mohtar Mas'ood menjelaskan konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain.

¹⁹ P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163

Di dalam Konsep ini juga di jelaskan seberapa luas cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara harus sesuai dengan kemampuan yang di miliki negara tersebut.⁶ Kemampuan disini menjadi batasan yang sudah seharusnya didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh suatu negara.²⁰

Dalam mewujudkan kepentingan nasional, negara sebagai organisasi yang memiliki otoritas harus tetap mengembangkan serta menguatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang di miliki negara nya agar kepentingan nasional nya tidak terpengaruh oleh kepentingan nasional negara lain.

Penguatan disini di maksudkan agar dalam melakukan interaksi ataupun kerjasama internasional dengan negara lain, keberadaan kepentingan nasional dari dalam negara itu sendiri tidak terganggu. Penguatan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia dalam hal ini dapat di wujudkan melalui pembuatan kebijakan serta implementasi kebijakan yang di ciptakan oleh Pemerintah agar kepentingan nasional dapat tetap tercapai. ²¹

²⁰ Mas' oed Mochtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hlm.34

²¹ Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe. 1990 *Pengantar Hubungan internasional: Keadilan dan power*, Bandung: CV Abardin. Hlm 115

1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang di gunakan untuk menghasilkan narasi atau deskripsi secara tekstual dari fenomena yang akan di teliti.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini akan menggambarkan fakta, keadaan, kegiatan, perilaku dan pikiran dari suatu kelompok tertentu. Penelitian deskriptif menjelaskan adanya keterkaitan hubungan antara perilaku yang di teliti dengan variabel lain yang akan di gunakan untuk menjelaskan atau memeriksa penyebabnya dan fenomena yang ada secara sistematis.²²

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan melalui wawancara langsung dengan subyek dari penelitian ini yaitu badan yang menaungi industri batik di Kota Surakarta khususnya Laweyan yaitu Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan serta Pemerintah Kota Surakarta yang di dalamnya terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM. Selain wawancara, penulis juga melakukan studi pustaka sebagai sumber data acuan dalam penelitian ini.

²² Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hal. 111

1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut dimana Bab I merupakan latar belakang dan identifikasi dari masalah yang akan di teliti yaitu mengenai upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan industri batik sebagai respon terhadap serbuan tekstil motif batik dari Tiongkok.

Selanjutnya, di Bab II akan menjelaskan mengenai batik sebagai salah satu klaster industri Kota Surakarta

Bab III akan menjawab pertanyaan penelitian ini sendiri dengan membahas mengenai upaya-upaya pemerintah Kota Surakarta dan Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL) dalam menguatkan industri batik sebagai respon terhadap serbuan tekstil motif batik dari Tiongkok yang sempat membanjiri pasar batik di Indonesia.

Bab IV akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran yang diberikan oleh penulis.